



TAHUN 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 KEL. BONE TUA

M A S A M B A

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara dapat diselesaikan dengan baik.

Lakip Dinas LH Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Lakip ini memuat Hasil capaian Kinerja Organisasi Dinas LH pada Tahun 2019 terhadap Rencana Strategis Menengah Renstra Dinas LH Tahun 2016-2021.

Semoga Lakip dapat menjadi Rujukan bagi Pemangku Kepentingan dalam mengukur Kinerja Pemerintah Daerah khususnya Dinas LH.



Masamba, Januari 2020
Kepala Dinas LH

I. BAMBANG IRAWAN, M.Si

Pkt. Pembina Utama Muda

Nip. : 19611231 199303 1 043

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DATAR TABEL.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Dinas LH	I-1
1.2. Permasalahan Utama Organisasi	I-7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Review Rencana Kinerja	II-1
2.2. Penetapan Kinerja	II-1
2.3. Perjanjian Kinerja	II-5
 BAB III PENGUKURAN KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Dinas LH	III-1
3.1.1. Capaian Kinerja Dinas LH Berbasis Renstra	III-1
3.1.2. Capaian Kinerja Dinas LH Berbasis RPJMD	III-14
3.1.3. Capaian Kinerja Berbasis Standar Nasional	III-17
3.2. Akuntabilitas Keuangan Dinas LH	III-22
3.2.1. Pendapatan Asli Daerah	III-22
3.2.2. Belanja Daerah	III-23
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	IV-1
4.2. Saran Tindak Lanjut	IV-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas LH Kab. Luwu Utara.....	I-2
Gambar 2.	Jenis Pegawai Dinas LH Tahun 2019.....	I-3
Gambar 3.	Komposisi ASN Dinas LH Berdasarkan Urutan Kepangkatan	I-3
Gambar 4.	Komposisi ASN Dinas LH Berdasarkan Tingkat Pendidikan	I-4
Gambar 5.	Jumlah Tenaga Kontrak Dinas LH Tahun 2019	I-4
Gambar 6	Perbandingan Tingkat Efisiensi Serapan Anggaran Dinas LH	III-24
Gambar 7	Tingkat Efisiensi Serapan Anggaran Level Program Tahun 2019.....	III-28
Gambar 8	Tingkat Efisiensi Serapan Anggaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.....	III-29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi Sarana dan Prasarna Pendukung Dinas LH Tahun 2019.....	I-5
Tabel 2.1	Rincian Postur APBD DPA Dinas LH Tahun 2019.....	II-2
Tabel 2.2	Program / Kegiatan APBD DPA Dinas LH Tahun 2019	II-2
Tabel 2.3	Program/Kegiatan APBD DPA Dinas LH Tahun 2019	II-2
Tabel 2.4	Rincian Postur APBD DPPA Dinas LH Tahun 2019	II-2
Tabel 2.5	Program/Kegiatan APBD DPPA Dinas LH Tahun 2019	II-4
Tabel 2.6	Penetapan Kinerja Dinas LH Tahun 2019	II-6
Tabel 3.1	Klasifikasi IKLH	III-2
Tabel 3.2	Analisis Capaian Sasaran Strategis Pertama	III-3
Tabel 3.3	Lokasi Sampling Kualitas Air Sungai 2019	III-4
Tabel 3.4	Status Mutu Air Sungai.....	III-5
Tabel 3.5	Scoring Indeks Kualitas Air.....	III-7
Tabel 3.6	Kegiatan yang Berkontribusi Pada Kemajuan Sasaran Pertama	III-9
Tabel 3.7	Jumlah Biogas Rumah Terbangun Tahun 2019	III-10
Tabel 3.8	Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Pengangkutan Sampah ..	III-11
Tabel 3.9	Sektor Kontribusi Pengurangan Sampah Kab. Luwu Utara	III-13
Tabel 3.10	Kegiatan Yang Berkontribusi Pada Kemajuan Sasaran Kedua.....	III-14
Tabel 3.11	Indikator Kinerja RPJMD	III-15
Tabel 3.12	Standar Nasional Dan Target Capaian Tahun 2019	III-18
Tabel 3.13	Kontribusi Pusat Daur Ulang Terhadap Target Nasional	III-19
Tabel 3.14	Kontribusi Penanganan Sampah Terhadap Target Nasional	III-19
Tabel 3.15	Kontribusi Peningkatan Kapasitas Terhadap Target Nasional	III-20
Tabel 3.16	Kontribusi Adaptasi Perubahan Iklim Terhadap Target Nasional	III-20
Tabel 3.17	Kontribusi Kajian Dampak Lingkungan Terhadap Target Nasional	III-21
Tabel 3.18	Kontribusi Keanekaragaman hayati Lingkungan target nasional.....	III-21
Tabel 3.19	Kontibusi Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Target Nasional	III-21
Tabel 3.20	Realisasi PAD Per 31 Desember 2019.....	III-23
Tabel 3.21	Realisasi Serapan Belanja Langsung Dinas LH	III-23
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program / Kegiatan	III-24



1.1. GAMBARAN UMUM DINAS LH

1.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, pada Tahun 2017 Kantor Lingkungan Hidup bermetamorfosis menjadi Dinas Lingkungan Hidup dimana peraturan teknisnya tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas LH dipimpin oleh seorang Pejabat Setingkat Eselon 2 (Dua) yang memiliki tugas dan fungsi memimpin kantor dalam menyelenggarakan pembinaan dibidang :

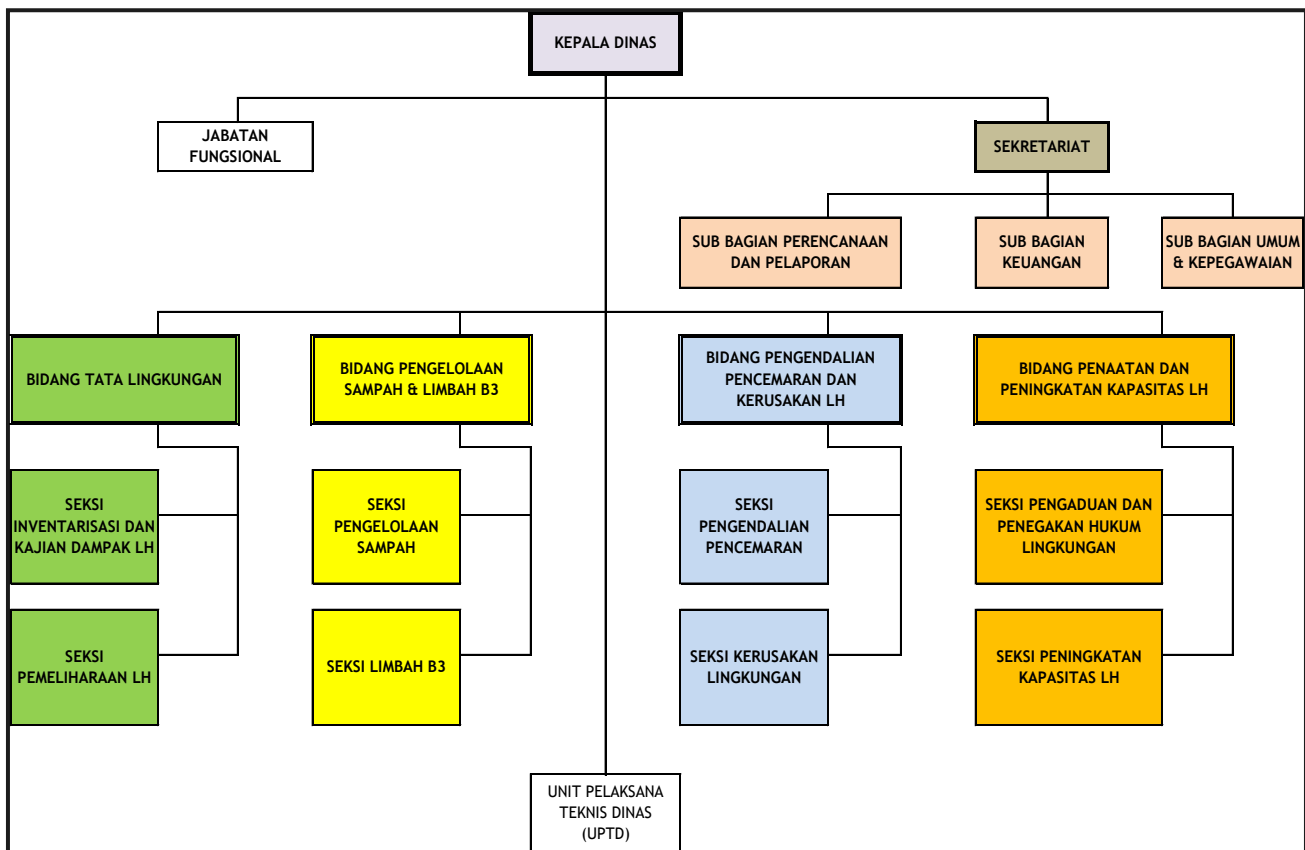
1. Tata Lingkungan
2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
3. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH
4. Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas dibantu oleh 5 (Lima) Pejabat Eselon 3 dan 11 Pejabat Eselon IV. Masing-masing dari pembantu tersebut adalah

1. Sekretaris yang memimpin Kesekretariatan dinas yang terdiri dari 3 Sub bagian yakni Subag Perencanaan dan Pelaporan, Subag Keuangan dan Subag Umum dan Kepegawaian.
2. Kabid Tata Lingkungan membawahi Seksi Inventarisasi dan Kajian Dampak LH dan Seksi Pemeliharaan LH.
3. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi Seksi Pengelolaan Sampah dan Seksi Limbah B3.
4. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahi seksi Pengendalian Pencemaran dan seksi Kerusakan LH.

5. Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH membawahi Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Seksi Peningkatan Kapasitas LH.

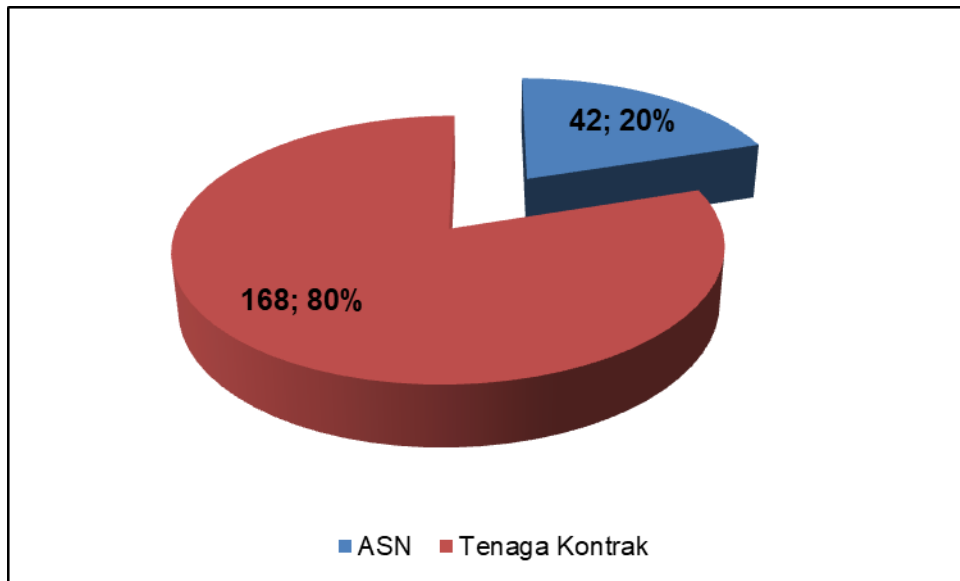
Secara teknis hierarki Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Luwu utara disajikan pada gambar 1.



Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas LH

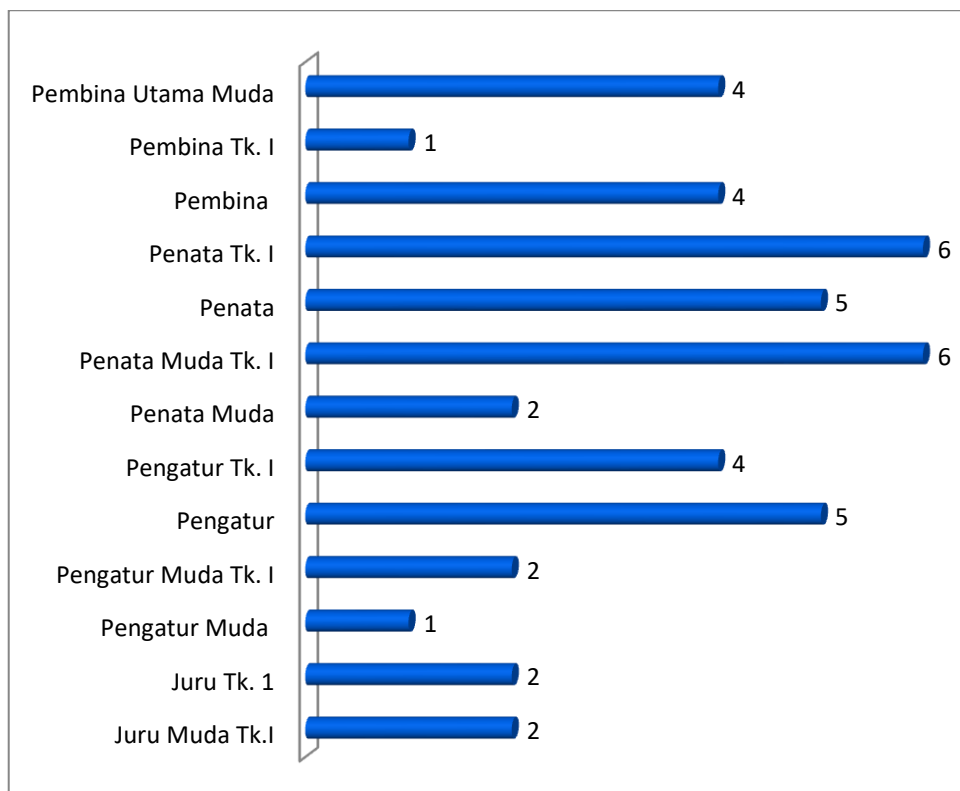
1.1.2. Sumber daya Manusia

Ditinjau dari komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup tercatat pada Tahun 2019 Secara keseluruhan berjumlah 210 Orang yang terbagi kedalam ASN Dinas LH dan Tenaga Kontrak. Untuk ASN berjumlah 43 (Empat Puluh Tiga) orang sedangkan Tenaga Kontrak berjumlah 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) Orang. Gambar 2. Menyajikan Porsi Jenis Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019.



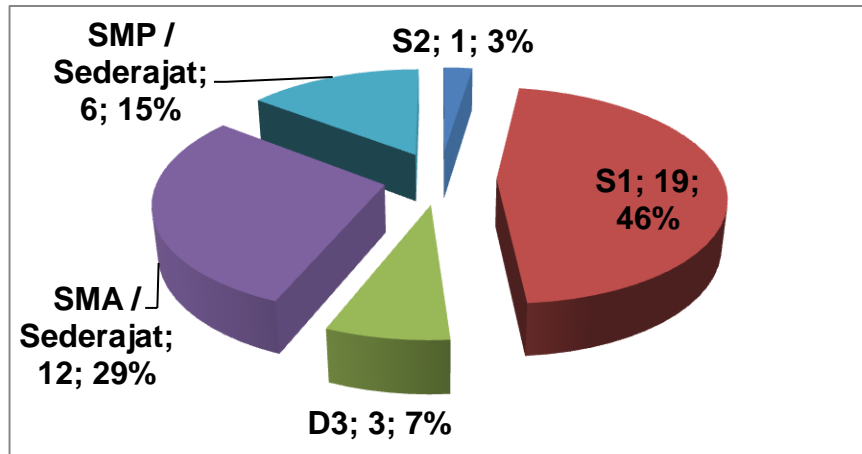
Gambar 2.
Jenis Pegawai Dinas LH Tahun 2019

Berdasarkan urutan kepangkatan komposisi ASN Dinas LH Disajikan pada **Gambar 3.**



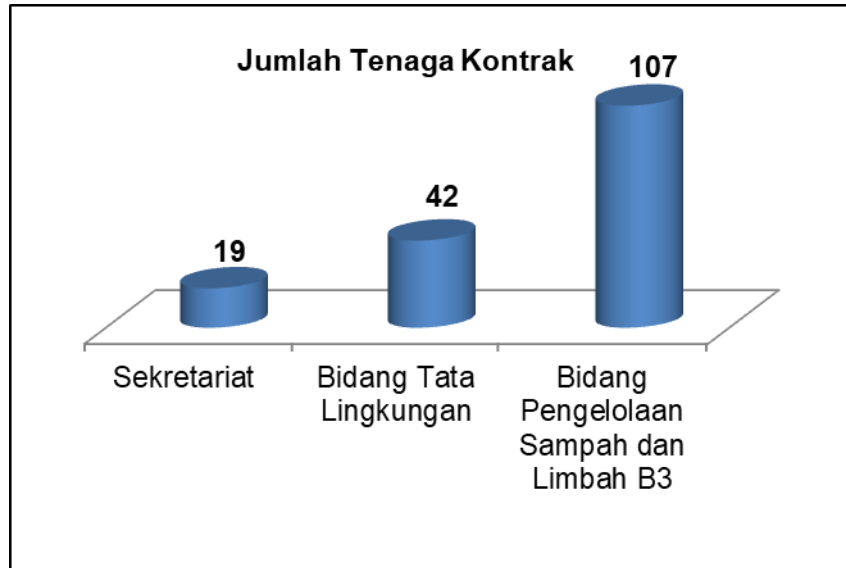
Gambar 3.
Komposisi ASN Dinas LH
Berdasarkan urutan kepangkatan

Sedangkan komposisi dan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada **Gambar 4.**



Gambar 4.
Komposisi ASN Dinas LH
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk Tenaga kontrak, tersebar pada Sekretariat dan 2 bidang, Sebaran tenaga kontrak disajikan Pada **Gambar 5**



Gambar 5.
Jumlah Tenaga Kontrak Dinas LH Tahun 2019

1.1.3. Sarana dan Prasarana

Salah satu Sumberdaya utama Pelaksanaan Operasional Dinas LH adalah sarana prasarana. Kondisi sarana dan prasarana pendukung Pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Dinas LH Tahun 2019

NO	Jenis Barang / Nama Barang	Volume	Keadaan		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
I	Aset Tidak Bergerak				
	1 Gedung Laboratorium	1 Unit	1		
	2 Gedung TPST	1 Unit	1		
	3 TPA Meli	1 Lokasi		1	
II	Aset Bergerak				
	1 Alat Pengolahan Sampah				
	a. Excavator PC 100	1 Unit	1		
	b. Dump Truck	6 Unit	6		1
	c. Arm Roll	3 Unit	3		
	d. Motor Gandeng Sampah	23 Unit	11	1	11
	e. Kontainer	16 Unit	16		
	f. Gerobak Sampah	55 Unit			
	g. Mesin Potong Rumput	21 Unit	12	1	8
	h. Komposter	48 Unit	48		
	i. Mesin Pencacah Sampah Organik	1 Unit	1		
	j. Alat Komveyor Feeder	1 Unit	1		
	k. Mesin Pengayak	1 Unit	1		
	l. Mesin Pencacah Plastik & Kelengkapannya	1 Unit	1		
	m. Mesin Pengolahan Sampah Sistem Organik	1 Unit	1		
	2 Alat Pemeliharaan RTH				
	a. Chain Saw	1 Unit	1		
	b. Mesin Gergaji	7 Unit			7
	c. Tangga Aluminium	1 Unit	1		
	3 Alat Laboratorium				
	1 Mobil Laboratorium	1 Unit	1		
	2 UV Vis 230	1 Unit	1		

NO	Jenis Barang / Nama Barang	Volume	Keadaan		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
	3 Gas & Smoke Analyzer	1 Unit	1		
	4 Soil Analyzer	1 Unit	1		
	5 Portable Multi Gas Analyzer	1 Unit			1
	6 Storage Cabinet	1 Unit	1		
	7 Lemari Asam	1 Unit			1
	8 Water Purification	1 Unit		1	
	9 BOD Meter	1 Unit		1	
	10 COD Meter	1 Unit		1	
	11 Peralatan Reflux	1 Unit	1		
	12 Peralatan Titrasi	1 Unit	1		
	13 Oven	1 Unit	1		
	14 Penangas Air	1 Unit	1		
	15 Tanur	1 Unit	1		
	16 Peralatan Lab Pendukung	1 Paket	1		
	17 GPS	2 Unit	2		
	4 Peralatan Kantor				
	a. Meja	26 Unit	23		3
	b. Kursi	28 Unit	22		6
	c. Kamera Digital	1 Unit	1		
	d. Lemari Arsip	16 Unit	5		11
	e. Bangku Tunggu	2 Unit	2		
	f. Sofa	1 Set	1		
	g. PC	10 Unit	4		6
	h. Laptop	13 Unit	6		7
	i. Scanner	1 Unit	1		
	j. Proyektor	2 Unit	1	1	
	k. Printer	16 Unit	6		10
	l. Absensi Fingerprint	2 Unit	2		1
	M. Generator Set	1 Unit		1	
	5 Kendaraan Dinas				
	a. Mobil Duple Cabin	1 Unit	1		
	b. Minibus	1 Unit	1		
	c. Motor	10 Unit	8		2

1.2. Permasalahan Utama Organisasi

Tahun 2019 merupakan tahun Ketiga Dinas LH melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun Ketiga pelaksanaan tugas seharusnya sudah masuk dalam tahap “**Penguatan**” namun masih saja terdapat kendala dalam mewujudkan Visi dan misi Renstra Dinas LH.

Hasil evaluasi akhir Tahun 2019 menunjukkan beberapa hambatan dan tantangan dalam mewujudkan visi dan misi tersebut.

Hambatan – hambatan yang dialami diantaranya

1. Rendahnya Kapasitas pegawai baik kapasitas manajemen maupun kapasitas teknis dalam Pengelolaan dan Perlindungan LH.
2. Tidak adanya Tenaga Fungsional tertentu yakni Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan sehingga Pelaksanaan kegiatan menjadi tidak Optimal..
3. Sekretariat dinas LH yang masih menumpang pada gedung laboratorium menyebabkan operasional laboratorium menjadi tidak optimal, dan juga pelaksanaan operasional perkantoran menjadi tidak representatif diakibatkan kapasitas ruangan yang tidak memadai (5 Ruangan ditempati oleh 43 orang).

Tantangan yang dihadapi adalah :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pelestarian serta perlindungan LH.
2. “*Mindset*” ASN pengelola LH yang masih belum berubah.
3. Masih tingginya budaya ego sektoral di kalangan pegawai.



2.1. Review Rencana Kinerja

Visi dinas LH dalam Renstra yakni **Luwu Utara Lestari Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan.**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan pelaksanaan operasional dalam bentuk misi Renstra antara lain :

- 1) Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan profesional dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Mengembangkan Pelayanan serta Sistem Informasi perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang terintegrasi;
- 3) Mengendalikan Dampak Pembangunan terhadap kelestarian fungsi LH;
- 4) Menciptakan Peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Menegakkan Regulasi dan Kesadaran Hukum Lingkungan Hidup.

2.2. PENETAPAN KINERJA

1.2.1. Postur APBD Dinas LH Tahun 2019

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang APBD kabupaten Luwu Utara TA. 2019 yang didetailkan dalam Peraturan Bupati nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD kabupaten Luwu Utara TA. 2019, ditetapkan Postur Target Pendapatan Asli daerah Melalui Retribusi Persampahan sebesar **Rp. 260.040.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)** serta Anggaran Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 (**DPA SKPD**) **Rp. 5.064.769.000 (Lima Milyar Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).**

Postur anggaran tersebut teralokasi dalam 3 jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rincian Postur APBD DPA Dinas LH Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran
1	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.526.544.000
2	Belanja Modal	Rp 742.625.000
	JUMLAH TOTAL	Rp 5.269.169.000

Postur APBD DPA Dinas LH Tahun 2019 terdistribusi kedalam 9 Program dan 22 kegiatan, detail rincian tersebut disajikan pada **Tabel 2.2**:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan APBD DPA Dinas LH Tahun 2019

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	PENANGGUNG JAWAB
BELANJA LANGSUNG	Rp 5.064.769.000	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 551.249.200	
1. Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 400.000	Subag. Umum dan Kepegawaian
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 25.000.000	Subag. Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional	Rp 32.400.000	Subag. Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 18.000.000	Subag. Keuangan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 10.000.000	Subag. Umum dan Kepegawaian
5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp 220.000.000	Subag Perencanaan & Pelaporan
6. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian & Asset	Rp 245.449.200	Subag. Keuangan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 95.000.000	
1. Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Rp 9.500.000	Subag. Umum dan Kepegawaian
2. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Rp 20.000.000	Subag. Umum dan Kepegawaian
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 45.000.000	Subag. Keuangan
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 20.500.000	Subag. Umum dan Kepegawaian
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 11.000.000	
Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Rp 11.000.000	Subag. Umum dan Kepegawaian
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 60.230.000	
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 60.230.000	Subag. Umum dan Kepegawaian

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	PENANGGUNG JAWAB
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 45.200.000	
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 45.200.000	Subag Perencanaan & Pelaporan
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 2.819.847.800	
1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Rp 90.000.000	Seksi Pengelolaan Sampah
2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Rp 2.729.847.800.	Seksi Pengelolaan Sampah
7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 816.149.500	
1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rp 46.326.000	Seksi Penegakan hukum
2. Pengkajian dampak lingkungan	Rp 32.729.500	Seksi Inventarisasi & Kajian Dampak LH
4. Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Rp 730..725.000	Seksi Kerusakan Lingkungan
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Rp 6.369.000	Seksi Kerusakan Lingkungan
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Rp 62.556.000	
1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Rp 62.556.000	Seksi Peningkatan Kapasitas LH
9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 603.536.500	
1. Pemeliharaan RTH	Rp 603.536.500	Seksi Pemeliharaan LH

1.2.2. Postur APBD Perubahan Dinas LH Tahun 2019

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang APBD kabupaten Luwu Utara TA. 2019 yang didetailkan dalam Peraturan Bupati nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD kabupaten Luwu Utara TA. 2019, ditetapkan Postur Target Pendapatan Asli daerah Melalui Retribusi Persampahan sebesar **Rp. 201.720.000 (Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** serta postur Anggaran Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 (DPPA SKPD) sebesar **Rp. 6.310.775.298 (Enam Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tujuh**

Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Postur alokasi anggaran tersebut dialokasin kedalam 2 komponen Belanja yakni sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rincian Postur APBD DPPA Dinas LH Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran
1	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.526.544.000
2	Belanja Modal	Rp 742.625.000
TOTAL PAGU		Rp 5.269.169.000

Postur APBD DPPA Dinas LH Tahun 2019 terdistribusi kedalam 9 Program dan 23 kegiatan, detail rincian tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan APBD DPPA Dinas LH Tahun 2019

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	PENANGGUNG JAWAB
BELANJA LANGSUNG	Rp 5.064.769.000	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 633.388.728	
1. Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 400.000	Subag. Umum dan Kepegawaian
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 18.765.228	Subag. Umum dan Kepegawaian
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional	Rp 27.400.000	Subag. Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 18.000.000	Subag. Keuangan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 7.120.000	Subag. Umum dan Kepegawaian
6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp 320.000.000	Subag Perencanaan & Pelaporan
7. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian & Asset	Rp 241.703.500	Subag. Keuangan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 210.123.972	
1. Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Rp 4.500.000	Subag. Umum dan Kepegawaian
2. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Rp 20.000.000	Subag. Umum dan Kepegawaian
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 161.000.000	Subag. Keuangan
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 24.623.972	Subag. Umum dan Kepegawaian
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 9.900.000	
Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Rp 9.900.000	Subag. Umum dan Kepegawaian

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	PENANGGUNG JAWAB
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 70.999.500	
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 70.999.500	Subag. Umum dan Kepegawaian
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 63.470.000	
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 63.470.000	Subag Perencanaan & Pelaporan
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 2.754.847.800.	
1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		Seksi Pengelolaan Sampah
2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Rp 2.754.847.800.	Seksi Pengelolaan Sampah
7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 855.346.500	
1. Pemantauan Kualitas Lingkungan	Rp 41.697.000	
2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rp 46.326.000	Seksi Penegakan hukum
2. Pengkajian dampak lingkungan	Rp 32.729.500	Seksi Inventarisasi & Kajian Dampak LH
4. Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Rp 728.225.000	Seksi Kerusakan Lingkungan
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Rp 6.369.000	Seksi Kerusakan Lingkungan
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Rp 62.556.000	
1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Rp 62.556.000	Seksi Peningkatan Kapasitas LH
9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 608.536.500	
1. Pemeliharaan RTH	Rp 608.536.500	Seksi Pemeliharaan LH

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Pada Tahun 2019 capaian Kinerja Dinas LH diukur berdasarkan hasil penyusunan Cascading Dinas LH. Penetapan Kinerja Tahun 2019 Dinas LH telah menetapkan 2 Sasaran Strategis dengan 6 Indikator Kinerja sasaran yang akan diukur dan dianalisis capaiannya, table berikut menyajikan Perjanjian Kinerja tersebut berikut disajikan Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan Alokasi APBD dan APBD Perubahan, maka disusun Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas LH dengan Bupati Luwu Utara selaku Atasan langsung. Perjanjian ini dibuat **direvisi 2 (dua) kali** disebabkan oleh Pergantian Pejabat serta Perubahan DPA menjadi DPPA,

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5
Penetapan Kinerja Dinas LH Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TERJAGANYA KUALITAS LH LUWU UTARA	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Tutupan Lahan 	62,33 91,94 75,23
2	MENINGKATNYA PENGELOLAAN VOLUME TIMBULAN SAMPAH dan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Volume Sampah SRT dan SSSRT Tertangani - Persentase Voume Sampah SRT dan SSSRT Terkurangi melalui 3R - Persentase Volume Limbah B3 Terkelola 	13,54% 2,13% 16%

Salinan Perjanjian Kinerja disajikan pada bagian lampiran yang tidak terpisahkan dalam Laporan ini.



3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS LH TAHUN 2019

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja dinas Lingkungan Hidup didasarkan pada Capaian Kinerja sasaran.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Pengukuran Kinerja Dinas LH merujuk pada hasil Pencapaian Sasaran Strategis Dinas LH Tahun 2016-2021. Terdapat 2 jenis pengukuran kinerja yaitu **(1) Capaian Kinerja Dinas LH Tahun 2019**, pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan Indikator Kinerja Antara target Renstra Tahun 2019 dengan Realisasi Tahun 2019. **(2) Tingkat Capaian Kinerja Renstra**, merupakan pengukuran Kinerja Renstra secara keseluruhan yang diidentifikasi dengan cara membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 dengan Target Indikator Kinerja pada akhir Renstra Tahun 2021.

Tahun 2019 merupakan Tahun Ketiga Implementasi Renstra Dinas LH tahun 2016-2021, dimana pada Tahun Pertama (2016) Urusan Lingkungan Hidup Masih ditangani oleh Kantor Lingkungan Hidup dan Tahun kedua (2017) bertransformasi menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

3.1.1. Capaian Kinerja Dinas LH Tahun 2019 Berbasis Renstra

Pada Tahun 2019 capaian Kinerja Dinas LH diukur berdasarkan hasil penyusunan Cascading Dinas LH. Penetapan Kinerja Tahun 2019 Dinas LH telah menetapkan 2 Sasaran Strategis dengan 6 Indikator Kinerja sasaran yang akan diukur dan dianalisis capaiannya, table berikut menyajikan Perjanjian

Kinerja tersebut berikut disajikan Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran yang ditetapkan.

3.1.1.1. Sasaran Pertama

Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup Luwu Utara merupakan Sasaran Strategis Dinas LH pertama yang disusun berdasarkan Cascading. Sasaran ini dapat diukur melalui tiga (3) indikator yakni Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan menjadi satu kesatuan yang biasa disebut dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang memberikan Informasi dan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penghitungan nilai IKLH dirumuskan berdasarkan 3 indikator yaitu: (1) kualitas air sungai yang tercermin dalam Indeks Kualitas Air (IKA); (2) Kualitas udara ambien yang tercermin dalam Indeks Kualitas Udara (IKU); dan (c) Kualitas Tutupan Lahan yang tercermin dalam Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dengan Rumus untuk menghitung IKLH adalah sebagai berikut :

$$\text{IKLH} = (30\% \times \text{IPA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$$

Hasil penghitungan IKLH kemudian dikonversikan kedalam Klasifikasi IKLH sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut ini;

Tabel 3.1
Klasifikasi IKLH

No	Klasifikasi IKLH	Nilai
1	Unggul	$x > 90$
2	Sangat Baik	$82 < x \leq 90$
3	Baik	$74 < x \leq 82$
4	Cukup	$66 \leq x \leq 74$
5	Kurang	$58 \leq x < 66$
6	Sangat Kurang	$50 \leq x < 58$
7	Waspada	$x < 50$

Melalui hasil Sampling pada kegiatan pemantauan kualitas lingkungan maka didapat nilai Kualitas Lingkungan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.2
Analisis Capaian Sasaran Strategis Pertama
Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup Luwu Utara

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Renstra (2021)		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja Renstra
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6	9	10	11 = 10/9	9	10	11 = 10/9	12	13	14 = 13/12
Indeks Kualitas Air	Indeks	-	-	-	62,50	62,50	100,00%	62,22	62,22	100,00%	62,33	62,50	100,27%	62,55	62,50	99,92%
Indeks Kualitas Udara	Indeks	-	-	-	96,11	96,11	100,00%	91,83	91,83	100,00%	91,94			92,16	91,94	99,76%
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	-	-	-	81,18	75,23	92,67%	80,93	80,93	100,00%	80,68			80,33	80,68	100,44%

Dari table terlihat IKLH yang tumbuh Positif dari tahun 2018 ke 2019, Berikut diuraikan beberapa fakta terkait Kualitas Lingkungan di Luwu Utara secara detail.

1) Kualitas Air Luwu Utara

Mengutip buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2015, bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, salah satu metode untuk yang digunakan untuk menentukan indeks kualitas air adalah metode indeks pencemaran air sungai (PIj).

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Baku mutu yang digunakan dalam analisis indeks pencemaran adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang baku mutu dan Kerusakan LH.

Paramater pengujian yang digunakan dalam perhitungan indeks Kualitas Air (IKA) adalah parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Posfat, Fecal Coli dan Total Coliform.

Pada tahun 2019, melalui kegiatan Pemantauan Kualitas air telah dilakukan Pengambilan contoh air sungai untuk di uji Lab. Kualitasnya adapun sungai dan anak sungai yang diambil contohnya adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.3
Lokasi Sampling Kualitas Air Sungai, 2019

No	Nama Sungai	Periode Pemantauan	Titik Sampling	Jumlah Sampel
1	Masamba	1	4	4
2	Baliase	1	3	3
3	Bone-bone	1	3	3
4	Posaa	1	1	1
5	Kappuna	1	1	1
6	Uraso	1	1	1
7	Makowong	1	1	1
8	Batas radda	1	1	1
9	Anak sungai Sukamaju	1	1	1
Jumlah Total			16	16

Berdasarkan metode Indeks Pencemaran maka diperoleh Status mutu air dari 18 sampel tersebut yakni

Tabel 3.4
Status mutu Air Sungai Luwu Utara, 2019

NO	Nama Sungai	Lokasi	Hasil Uji Lab							Ci/Lix Baru							(Ci/Lix)R	(Ci/Lix)M	Pij	Status Mutu Air
			TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coli	total coliform	TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coli	total coliform				
1	Sungai Masamba	Desa Lero Kec. Masamba (Hulu)	7	7,43	2,8	6,4	0,019	23	43	0,14	-0,04	0,93	0,26	0,10	0,02	0,01	0,20	0,93	0,68	Memenuhi Baku Mutu
		Desa Baloli Kec. Masamba (Tengah)	20	7,23	2,8	5,9	0,019	23	75	0,40	-0,02	0,93	0,24	0,10	0,02	0,02	0,24	0,93	0,68	Memenuhi Baku Mutu
		Kel. Bone Tua Kec. Masamba (Tengah)	76	7,03	3	5,8	0,03	240	460	1,52	0,00	1,00	-2,17	0,15	0,24	0,09	0,12	1,52	1,08	Cemar Ringan
		Desa Mario Kec. Baebunta (Hilir)	48	6,43	2,6	5,1	0,16	23	75	0,96	0,05	0,87	0,20	0,52	0,02	0,02	0,38	0,96	0,73	Memenuhi Baku Mutu
2	Sungai Bone - Bone	Desa Bantimurung Kec. Bone-Bone (Hulu)	12	7,6	3	25,6	0,019	460	1100	-2,10	-0,05	1,00	1,05	0,10	-0,69	0,22	-0,07	1,05	0,75	Memenuhi Baku Mutu
		Kel. Bone-Bone Kec. Bone-Bone (Tengah)	8	7,8	3,8	26,8	0,02	240	460	-2,98	-0,07	1,27	1,07	-4,00	0,24	0,09	-0,63	1,27	1,00	Memenuhi Baku Mutu
		Desa Banyu Urip Kec. Bone - Bone (Hilir)	7	7,8	4,4	26,8	0,02	240	460	0,14	-0,07	1,83	1,07	-4,00	-2,10	0,09	-0,43	1,83	1,33	Cemar Ringan
3	Sungai Fosasa	Desa Mirianga Talii Kec. Sukamaju	20	7,6	3,4	27	0,019	23	43	0,40	-0,05	1,27	1,08	-4,11	0,02	0,01	-0,20	1,27	0,91	Memenuhi Baku Mutu
4	Sungai Ballase	Desa Pincara Kec. Masamba (Hulu)	10	7,6	3	14	0,12	93	240	0,20	-0,05	1,00	0,56	0,60	0,09	0,05	0,35	1,00	0,75	Memenuhi Baku Mutu
		Desa Mappadeceng Kec. Mappadeceng (Tengah)	9	7,2	3,2	19	0,17	75	160	0,18	-0,02	1,07	0,76	0,65	0,08	0,03	0,39	1,07	0,80	Memenuhi Baku Mutu

NO	Nama Sungai	Lokasi	Hasil Uji Lab							Ci/Lix Baru							(Ci/Lix)R	(Ci/Lix)M	Pij	Status Mutu Air
			TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coil	total coliform	TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coil	total coliform				
		Desa Kapti'l Kec. Mappadeceng (Hilir)	14	7,2	3,4	21	0,1	43	93	-1,76	-0,02	1,13	0,84	0,50	0,04	0,02	0,11	1,13	0,80	Memenuhi Baku Mutu
5	Sungai Kappuna	Kel. Kappuna Kec. Masamba	20	6,8	3,8	10	0,019	430	930	0,40	0,02	1,27	0,40	0,10	0,43	0,19	0,40	1,27	0,94	Memenuhi Baku Mutu
6	Sungai Uraso	Desa Uraso Kec. Sukamaju	13	7	4,2	10,1	0,019	1500	1000	0,26	0,00	1,40	0,40	0,10	1,50	0,20	0,55	1,50	1,13	Cemar Ringan
7	Sungai Makowong	Desa Makowong Kec. Tana Lili	47	7,8	4,4	10,3	0,019	750	1500	0,94	-0,07	1,47	0,41	0,10	0,75	0,30	0,56	1,47	1,11	Cemar Ringan
8	Sungai batas	Batas Desa Radda & Desa Baebunta	25	6,8	4	14,3	0,019	230	950	0,50	0,02	1,33	-0,21	0,10	0,23	0,19	0,31	1,33	0,97	Memenuhi Baku Mutu
9	Sungai Limbah Tahu Tempe	Desa Sukamaju Kec. Sukamaju	7	0	25	52,7	0	0	0	0,14	0,58	8,33	2,62	0,00	0,00	0,00	1,67	8,33	6,01	Cemar Sedang

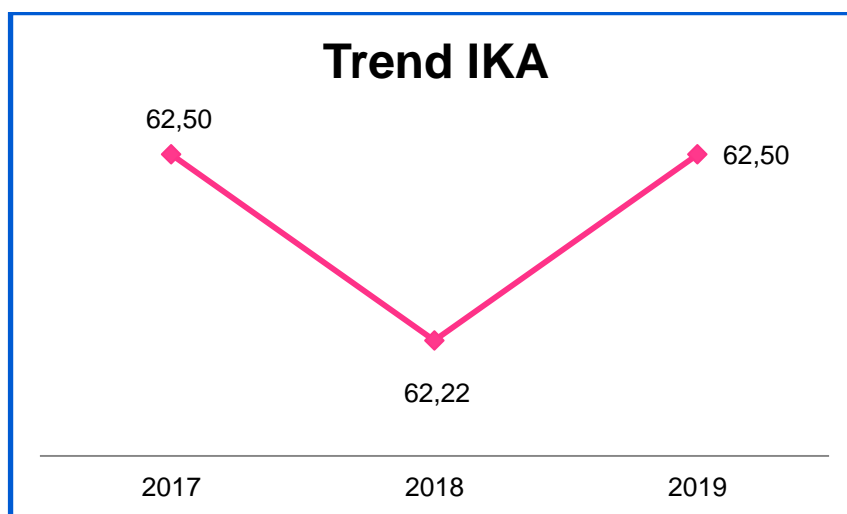
Hasil perhitungan status mutu air dengan metode Indeks Pencemaran menunjukkan dari 16 titik sungai yang ambil contohnya, terdapat yang berstatus 11 Sampel yang Memenuhi Baku Mutu dan 4 sampel berstatus Cemar ringan, 1 Sampel berstatus Cemar Sedang.

Berdasarkan hasil analisis diatas, untuk memperoleh Nilai Indeks Kualitas Air dilakukan scoring Indeks Kualitas Air tersebut seperti tabel berikut.

Tabel. 3.5
Scoring Indeks Kualitas Air, 2019

Status	Jumlah	Persentase	Koefisien	Nilai
1	2	3	4	5 = 3 x 4
Memenuhi Baku Mutu	11	68,75%	70	48,13
Cemar Ringan	4	25,00%	50	12,50
Cemar Sedang	1	6,25%	30	1,88
Cemar Berat	0	0,00%	10	0,00
Total	16			
NILAI INDEKS KUALITAS AIR				62,50

Hasil perhitungan diatas menunjukkan Indeks Kualitas Air Tahun 2019 mencapai angka 62,50, angka ini membaik dari Indeks Kualitas Air Tahun 2018 sebesar 62,25.



Gambar 1. Trend Indeks Kualitas Air

Secara Teoritis angka Indeks Kualitas Air di Luwu Utara masuk dalam kategori baik, akan tetapi secara factual Indeks Kualitas air belum menggambarkan kualitas air Luwu utara secara Keseluruhan, hal ini dikarenakan belum semua aliran Sungai diambil Contohnya utk diuji lab selain itu juga disebabkan oleh Belum adanya Identifikasi Sumber-sumber Pencemar di Luwu Utara. Contohnya pada tahun 2019 belum dilakukan Sampling di Sungai Lariang di Rampi (Sumber Pencemar Pertambangan Rakyat), sungai baebunta yang merupakan Outlet dari TPA Meli dan sungai-sungai lain yang sudah berpotensi tercemar baik dari Limbah Industri, Rumah tanga, maupun Pertanian. Berikut upaya yang sebaiknya dilakukan :

1. Untuk mengatasi kebutuhan Pejabat Fungsional tertentu maka diusulkan rekrutmen ASN Baru Melalui mekanisme yang diatur Oleh BKPSDM atau dengan mengoptimalkan ASN yang sudah ada melalui Mekanisme *Impassing*.
2. Penguatan Kapasitas Laboratorium Daerah yang notabene telah lengkap jika ditinjau dari segi lokasi dan Sarana dan prasarananya, tinggal kapasitas manajemen dan pengelola Laboratorium yang perlu ditingkatkan sehingga laboratorium Lingkungan Luwu Utara dapat terakreditasi sebagai salah satu syarat dalam melakukan analisa laboratorium.

2) Indeks Kualitas Udara

Mengutip buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2015, bahwa salah satu metode untuk yang digunakan untuk menentukan indeks kualitas udara adalah dengan menghitung Indeks Pencemar parameter NO_2 dan SO_2 . Parameter ini diukur melalui metode Passive sampler pada empat lokasi. Yang mewakili area Transportasi, Industri, Pemukiman dan Perkantoran.

Penghitungan Indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan Parameter NO_2 dan SO_2 terhadap standar European Union (EU) Directives. Adapun nilai standart NO_2 adalah $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan SO_2 adalah

Akumulasi Nilai Perbandingan Nilai rata-rata Tahunan Parameter NO₂ dan SO₂ dengan nilai standar European Union (EU) Directives menghasilkan nilai Indeks Udara yang dilambangkan dengan leu

Hingga laporan ini dibuat, belum ada data hasil Pemantauan Kualitas udara (*Passive Sampler*) sehingga Nilai Indeks Kualitas Udara belum dapat dihitung.

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Khusus untuk pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan perlu dilakukan penguatan jejaring informasi dengan membuat Perjanjian Kerjasama dengan LAPAN atau BIG maupun dengan Dinas Kehutanan dan Kelautan Provinsi terkait aktivitas Penghijauan hutan dan Amngrove serta informasi Spasial Tutupan Lahan di Kabupaten Luwu Utara.

Dalam mendukung tercapainya sasaran pertama diatas dilakukan beberapa program dan kegiatan diantaranya;

Tabel. 3.6
Kegiatan yang berkontribusi pada Kemajuan Sasaran Pertama

PROGRAM / KEGIATAN		Sasaran	Indikator Sasaran
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
	1. Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tersedianya Informasi Status Mutu Sungai dan Laut	Jumlah Titik Sungai dan Laut yang diinformasikan status mutunya
		Jumlah Titik yang diinformasikan status mutu udara	Jumlah Titik yang diinformasikan status mutu udara
		Jumlah Lokasi Lahan Budidaya yang diinformasikan Status Mutunya	Jumlah Lokasi Lahan Budidaya yang diinformasikan Status Mutunya
	2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Pembinaan Pelaku Usaha Berizin Lingkungan	Jumlah Pelaku Usaha berizin Lingkungan yang taat terhadap Izin Lingkungannya
	3. Pengkajian dampak lingkungan	Tersedianya Rekomendasi Kelayakan Lingkungan sesuai NSPK	Jumlah Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang di terbitkan Sesuai dengan NSPK
	4. Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan		
	5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup		
9.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
	1. Pemeliharaan RTH	Terlaksananya Pemeliharaan RTH Publik Kota	Luas Areal RTH Publik yang dipelihara

3.1.1.2. Sasaran kedua

Meningkatnya Pengelolaan Volume Timbulan Sampah Dan Limbah B3 merupakan Sasaran Strategis Dinas LH kedua yang disusun berdasarkan Cascading. Sasaran ini dapat diukur melalui tiga (3) indikator yakni Persentase Volume Sampah SRT dan SSSRT Tertangani, Persentase Volume Sampah SRT dan SSSRT Terkurangi melalui 3R dan Persentase Volume Limbah B3 Terkelola. Berikut disajikan capaian kinerja Dinas LH Terhadap Sasaran Kedua

Tabel 3.7
Analisis Capaian Sasaran Kedua
Meningkatnya Pengelolaan Volume Timbulan Sampah dan Limbah B3

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Renstra (2021)		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja Renstra
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6	9	10	11 = 10/9	9	10	11 = 10/9	12	13	14 = 13/12
Persentase Volume Sampah SRT dan SSSRT Tertangani	Persen	-	-	-	11,36%	12,25%	107,86%	11,27%	11,44%	101,53%	13,54%	14,13%	104,38%	20,23%	14,13%	69,86%
Persentase Volume Sampah SRT dan SSSRT Terkurangi melalui 3R	Persen	-	-	-	1,78%	1,80%	101,18%	2,01%	2,03%	101,21%	2,13%	2,07%	97,24%	3,79%	2,13%	56,20%
Persentase Volume Limbah B3 Terkelola	Persen	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	2,50%	0,00%	0,00%	16,00%	0,00%	0,00%	42,11%	0,00%	0,00%

Tabel diatas menunjukkan Fakta bahwa dari 3 Indikator Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Volume Timbulan Sampah dan Limbah B3 terdapat 2 Indikator Yang melampaui target dan 1 indikator yang tidak terlaksana.

1) Indikator Pertama (Persentase Volume Sampah SRT dan SSSRT Tertangani) dari target 13,54% yang ditetapkan. Volume Timbulan Sampah yang ditangani mencapai 14,13% atau setara dengan 6.463,93 Ton sampah yang ditangani pada Tahun 2019.

➤ Berikut fakta-fakta capaian kinerja Indikator Pertama:

- ✓ Dari 6.195 Ton target penanganan Timbulan Sampah Luwu Utara pada Tahun 2019, sekitar 6.463 Ton Timbulan Sampah yang berhasil ditangani (14,13%).
- ✓ Merujuk pada Renstra target ini telah tercapai akan tetapi jika merujuk pada target Nasional Pengelolaan Sampah sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati nomor 19 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada), capaian Penanganan Sampah di Luwu Utara masih Jauh dari Target yang ditetapkan.
- ✓ Dalam Dokumen Jakstrada disebutkan, angka Penanganan Sampah Pada Tahun 2019 Kabupaten Luwu Utara di targetkan mencapai 36.589 Ton atau sekitar 80% dari potensi timbulan Sampah di Luwu Utara (45.736 Ton).
- ✓ Terdapat Gap yang cukup besar yakni sekitar 65,87 % Timbulan Sampah yang belum dapat ditangani.
- ✓ Rendahnya Angka Persentase Penanganan Sampah di Kab. Luwu Utara disebabkan antara lain :
 - 1) Posisi geografis Kabupaten Luwu Utara yang luas dengan kontur yang bervariasi dimulai dari pesisir hingga pegunungan.
 - 2) Minimnya infrastruktur Pengelolaan Sampah di Luwu Utara diantaranya Infrastruktur TPA Meli dan armada Pelayanan Pengangkutan sampah masih sangat terbatas hingga praktis Pelayanan pengangkutan sampah hanya dilaksanakan di dalam Kota Masamba saja.

Tabel 3.8
Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Pengangkutan Sampah

No	Sarana	Jumlah	Fungsional	Rusak
1	Arm Roll	3	2	1
2	Dump Truck	6	5	1
3.	Container Sampah	28	14	14
4	Motor Gandeng Sampah	17	10	7
5	Eskavator	1	-	1
6	Buldozer	1	1	-

➤ **Solusi**

- ✓ Merencanakan Pembangunan TPS (Tempat Penampungan Sampah Sementara) atau TPA di beberapa titik, seperti TPA 1 berlokasi di Kecamatan Sukamaju / Bone2 untuk melayani daerah tanalili, Bone2, Sukamaju dan Sebagian Mappedeceng. TPA 2 Berlokasi di Kecamatan Baebunta Selatan untuk melayani Kecamatan Malangke, Malangke Barat dan Baebunta Selatan, serta TPA 3 di Kecamatan Sabbang untuk Melayani Kecamatan Sabbang dan Sabbang Selatan.
 - ✓ Menambah Armada Pelayanan Pengangkutan Sampah Secara bertahap untuk memenuhi target Jakstrada.
- 2) Indikator Kedua (Persentase Volume Sampah SRT dan SSSRT Terkurangi Melalui 3R) dari target 2,13% yang ditetapkan, Volume Timbulan Sampah yang dikurangi mencapai 2,07% atau setara dengan 947,32 Ton sampah yang dikurangi. Berikut fakta-fakta capaian kinerja Indikator Kedua:
- ✓ Dari 976 Ton target Pengurangan Timbulan Sampah Luwu Utara pada Tahun 2019, sekitar 943,32 Ton Timbulan Sampah yang berhasil dikurangi (2,07%).
 - ✓ Merujuk pada Renstra target ini baru tercapai akan 97,06% tetapi jika merujuk pada target Nasional Pengelolaan Sampah sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati nomor 19 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada), capaian Pengurangan Sampah di Luwu Utara masih Jauh dari Target yang ditetapkan.
 - ✓ Dalam Dokumen Jakstrada disebutkan, angka Pengurangan Sampah Pada Tahun 2019 Kabupaten Luwu Utara di targetkan mencapai 9.147 Ton atau sekitar 20% dari potensi timbulan Sampah di Luwu Utara (45.736 Ton).
 - ✓ Terdapat Gap yang cukup besar yakni sekitar 17,93 % Timbulan Sampah yang belum dapat dikurangi.
 - ✓ Rendahnya Angka Persentase Pengurangan Sampah di Kab. Luwu Utara disebabkan antara lain :

- 1) Rendahnya Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Persampahan yang ditandai dengan belum maraknya pengelolaan Sampah yang benar dalam bentuk Bank Sampah.
- 2) Sektor yang memberikan Kontribusi Pengurangan Sampah Pada tahun 2019 antara lain

Tabel 3.9
Sektor Kontribusi Pengurangan Sampah Kab. Luwu Utara

No	Sarana	Jumlah	Sampah yang dikurangi (Ton/Pertahun)
1	Pelapak	14	907,37
2	TPS3R bunga Masamba	1	30, 63
3.	Bank Sampah Induk	1	2,20

➤ **Solusi**

- ✓ Merencanakan membentuk bank Sampah Unit dan Desa mandiri Sampah.
 - ✓ Melakukan Pembinaan Kepada Pelapak yang ada Di Luwu Utara.
- 3) Indikator Ketiga, (Persentase Volume Limbah B3 yang terkelola) dari target 16% Volume Limbah B3 terkelola (8 Ton), Pada tahun 2019 Tidak ada data yang tersedia mengenai Volume limbah B3 yang terkelola. Tidak tersedianya data tersebut diantaranya adalah:
- ✓ pada tahun 2019 Tidak dialokasikannya anggaran kegiatan Penanganan Limbah B3.
 - ✓ Kapasitas ASN Pengelola Kegiatan Dalam Melakukan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 masih sangat minim karena pada Tahun 2018 sudah dialokasikan Anggaran Pengelolaan Limbah B3 tapi ditahun 2019 tidak dilaksanakan dengan alasan seperti yang dikemukakan pada point Pertama.
 - ✓ Hingga saat ini terdapat 2 pelaku usaha yang telah memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yakni RSUD Andi Jemma Masamba dan Pabrik Kelapa Sawit Jas Mulia.
- **Solusi**

- ✓ Di Tahun 2020 telah dialokasikan Anggaran Kegiatan Penanganan Limbah B3.
- ✓ Dilakukan Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pelaku Usaha dan ASN Pengelola Limbah B3.

Dalam mendukung tercapainya sasaran kedua diatas dilakukan beberapa program dan kegiatan diantaranya;

Tabel. 3.10
Kegiatan yang berkontribusi pada Kemajuan Sasaran kedua

PROGRAM / KEGIATAN		Sasaran	Indikator Sasaran
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		
	2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Tersedianya Petugas Pengelola Sampah	Pertugas Pengelola Sampah Petugas Pengelola PDU Container Sampah Arm Roll Sampah Dump Truck Motor gandeng Sampah Truck Compactor Sapras PDU terpelihara Jumlah Sapras TPA Terpelihara
2.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
	1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Jumlah Sekolah Peraih Predikat Adiwiyata

3.1.2. Capaian Kinerja Dinas LH Tahun 2019 Berbasis RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Luwu Utara telah Menetapkan Visi Luwu Utara Yang Religius Dengan Pembangunan Berkualitas Dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal dengan salah satu misinya adalah misi ke-5 yang berbunyi **Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup** dengan Sasaran Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam

penyelenggaraan pembangunan. Dinas Lingkungan Hidup berperan utama dalam kontribusi merealisasikan Misi tersebut.

Terdapat beberapa indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang dijadikan tolak ukur dalam merealisasikan misi tersebut diatas, indikator tersebut disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
Misi mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL	33,33%	40%	48%	56%	64%	71%	75%
	Penegakan hukum lingkungan	0%	2%	4%	6%	8%	9%	10%
	Pencemaran status mutu air	9,52%	14,29%	28,57%	42,86%	57,14%	71,43%	71,43%
	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	12,5%	12,5%	18,75%	25%	25%	31,25%	31,25%
	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	25,49%	28,52	34,44	40,36	46,75	54,49	54,49

Berdasarkan Penetapan Kinerja Dinas LH Tahun 2019, Indikator Kinerja sasaran yang menjadi Kontributor Kemajuan Indikator RPJMD adalah Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan dengan 4 Indikator Kinerja dengan capaian disajikan pada table berikut.

Tabel 3.12
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
Misi mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL	Persen	33,33	40	4	48	17,86	56	38,5	64		71		75	
2	Penegakan hukum lingkungan	Persen	0	2	0,4	4	2	6	3,6	8	4	9		10	
3	Pencemaran status mutu air	Persen	9,52	14,29		28,57		42,86		57,14		71,43		71,43	
4	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	Persen	12,5	12,5		18,75		25		25		31,25		31,25	
5	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	Persen	33,33	33,33		50		66,67		83,33		100		100	
6	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	25,49	28,52	32,64	34,44	32,15	40,36	31,17	46,75	32,03	54,49		54,49	

Tabel diatas menunjukkan dari 6 Indikator kemajuan daerah ada 3 Indikator yang dapat dihitung kontribusinya terhadap kemajuan RPJMD tersebut adalah

➤ Beberapa penjelasan terkait Tingkat Kemajuan Capaian Indikator RPJMD diuraikan sebagai berikut :

- ✓ Dengan Asumsi bahwa 10% Capaian kemajuan RPJMD pada Tahun 2021 adalah setara dengan 25 Rekomendasi tindak lanjut Penanganan aduan dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- ✓ Pada tahun 2016 dari target 5 aduan hanya 1 yang ditindaklanjuti, kemudian pada tahun 2017 dari 5 target aduan kelimanya ditindaklanjuti, Pada Tahun ketiga (2018) Dinas LH telah menerbitkan 3 rekomendasi tindak lanjut dari target 5 rekomendasi aduan yang ditindaklanjuti dan pada tahun 2019 hanya 1 aduan yang ditindaklanjuti .
- ✓ Dari rencana target 20 aduan yang ditindaklanjuti pada tahun Keempat RPJMD, hingga akhir Tahun 2019 aduan yang ditindaklanjuti baru mencapai 10 aduan.

Meningkatnya Upaya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan dengan indikator kinerja Persentase Pembinaan dan Pengawasan

Izin Lingkungan merupakan indikator yang beririsan dengan Indikator sasaran RPJMD yakni pada Indikator Cakupan Pelaksanaan AMDAL.

- Beberapa penjelasan terkait Tingkat Kemajuan Capaian Indikator RPJMD diuraikan sebagai berikut :
 - ✓ Hasil Pengukuran didasarkan pada Asumsi bahwa 75% Capaian kemajuan RPJMD pada Tahun 2021 Setara dengan 21 Usaha / kegiatan yang diawasi pengelolaan lingkungannya.
 - ✓ Pada Tahun 2019 Dinas LH telah melakukan melakukan Bimtek Tata cara pelaporan Pengelolaan Lingkungan bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin Lingkungan..
 - ✓ Bimtek yang diikuti oleh 16 Pelaku Usaha/Kegiatan bertujuan agar pelaku usaha mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dalam pengelolaan LH di lokasi usahanya/atau kegiatannya dan pada akhirnya mampu melaporkan hasil pengelolaan Lingkungannya kepada Perangkat Daerah sebagaimana Amanat Undang-undang baik secara *offline* maupun *Online*.
 - ✓ Diharapkan pada Tahun 2019 semua Pelaku Usaha tersebut melaporkan pengelolaan Lingkungannya sehingga dapat dikategorikan Pelaku Usaha yang “**TAAT**”.

3.1.3. Capaian Kinerja Dinas LH Tahun 2019 Berbasis Standar Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/MenLhk-Setjen/2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019; “Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.”

Untuk mencapai tujuan dimaksud KemenLHK telah menetapkan sasaran dan indikator kinerja sasaran serta target capaian pada Tahun 2019 yaitu:

Tabel 3.13
Standar Nasional dan target capaiannya Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2019	
1	berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya sebesar 20% dari 124.6 juta ton atau sebesar 24.5 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota	Pengurangan jumlah timbulan sampah melalui bank sampah kapasitas 1 ton/hari	1.800.250	Ton
2	Tertanganinya jumlah sampah sebesar 75% dari 124.6 juta ton atau sebesar 97.8 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota	Jumlah sampah tertangani di 380 kota melalui pemantaun dan evaluasi kota bersih, teduh, dan sehat berkelanjutan	19.070.316	Ton
3	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan	Jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya	3.200	Kader
		Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adhiwiyata)	1.400	Sekolah
		Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH	14.000	Anggota
4	Meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim di 15 wilayah	Fasilitasi inisiatif lokal adaptasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim	2.000	Desa
5	Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH daerah untuk menjadi Acuan dalam RPJMN	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan Pemerintah daerah	10	RPPLH
6	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yg efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	100	%
		Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK	250	KPA
			150	LPJP
7	Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati	300	Spesies
8	Meningkatnya efektifitas penangan pengaduan; Pengawasan izin lingkungan Izin PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi administrasi.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%
		Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH sebesar 100% per tahun dari izin yang diterbitkan oleh KLH	100	%

Berikut diuraikan beberapa capaian Kinerja Renstra dinas Lingkungan Hidup yang memberi kontribusi terhadap capaian Kinerja Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tahun 2019.

3.1.3.1 Pusat Daur Ulang (TPST & TPS3R)

Tabel 3.14
Kontribusi Pusat Daur Ulang (PDU) terhadap target nasional

Indikator Nasional / Indikator Renstra Dinas LH	Target Nasional / Realisasi Renstra Daerah Tahun 2019	Persentase
Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pusat daur ulang (recycle center) kapasitas 10 ton/hari sebesar 131.400 ton dalam 5 tahun --> 4 unit	1.800.250 Ton	0,002%
Pengurangan Jumlah timbunan sampah melalui TPS3R Bunga Masamba	33,4 Ton	

Hasil persandingan menunjukkan bahwa Kontribusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara terhadap pengurangan Jumlah Timbunan sampah melalui TPS3R Bunga Masamba mencapai 0,002%, dimana sepanjang Tahun 2019 TPS3R Bunga Masamba telah mengelola sampah melalui penerapan Pola 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebanyak 33,40 Ton.

3.1.3.2 Penanganan Sampah

Tabel 3.15
Kontribusi Penanganan Sampah terhadap target nasional

Indikator Nasional / Indikator Renstra Dinas LH	Target Nasional / Realisasi Renstra Daerah Tahun 2019	Persentase
Jumlah sampah tertangani di 380 kota melalui pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh, dan sehat berkelanjutan	19.070.316 Ton	0,03%
Volume Sampah Tertangani Kab. Luwu Utara	6.386,37 Ton	

Hasil persandingan menunjukkan bahwa Kontribusi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap Penanganan Sampah dalam hal ini Pelayanan pengangkutan sampah Secara langsung menuju TPA Meli baebunta mencapai 0,03%, dimana sepanjang Tahun 2019 jumlah sampah yang tertangani sebanyak 6.286,37 Ton Sampah dari target nasional 19,1 juta Ton.

3.1.3.3 Peningkatan kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan

Tabel 3.16
Kontribusi Peningkatan Kapasitas terhadap Target Nasional

Indikator Nasional / Indikator Renstra Dinas LH	Target Nasional / Realisasi Renstra Daerah Tahun 2018	Persentase Kontribusi
Jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya	3.200 Kader	0,78%
Jumlah Kader Lingkungan Kab. Luwu Utara	25 Kader	
Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata)	1.400 Sekolah	0,29%
Jumlah Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten	4 Sekolah	
Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH	14.000 Anggota	0,29%
Jumlah Anggota saka kalpataru Kab. Luwu Utara	40 Anggota	

Kontribusi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap capaian Kader Lingkungan sebesar 0,78%, sedangkan untuk Sekolah Adiwiyata adalah 0,29% demikian pula dengan jumlah anggota Saka Kalpataru kontribusinya mencapai 0.29%.

3.1.3.4 Adaptasi Perubahan Iklim

Tabel 3.17
Kontribusi Adaptasi Perubahan Iklim terhadap target nasional

Indikator Nasional / Indikator Renstra Dinas LH	Target Nasional / Realisasi Renstra Daerah Tahun 2017	Persentase
Fasilitasi inisiatif lokal adaptasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim	2.000 Desa	0,10%
Jumlah Desa Di Luwu Utara masuk dalam Sistem Proklam	2 Desa	

Hasil persandingan menunjukkan bahwa Kontribusi Jumlah Desa Di Luwu Utara yang masuk dalam Sistem Desa Proklam mencapai 0,10%. Dimana pada Tahun 2019 telah ditetapkan 2 desa Proklam yakni desa Poreang Kecamatan Tanalili dan Desa Tulak Tallu kecamatan Sabbang.

3.1.3.5 Kajian Dampak Lingkungan

Tabel 3.18
Kontribusi Kajian Dampak Lingkungan terhadap target nasional

Indikator Nasional / Indikator Renstra Dinas LH	Target Nasional / Realisasi Renstra Daerah Tahun 2017	Persentase
Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan Pemerintah daerah	10 RPPLH	10,00%
RPPLH Kab.Luwu Utara	1 Dokumen	

Hasil persandingan menunjukkan bahwa permohonan penilaian dokumen Lingkungan Kabupaten Luwu Utara telah dilayani. Selain itu pada Tahun 2017 telah terbentuk Komisi Penilai AMDAL Luwu Utara.

3.1.3.6 Keanekaragaman Hayati

Tabel 3.19
Kontribusi Keanekaragaman hayati terhadap target nasional

Indikator Nasional / Indikator Renstra Dinas LH	Target Nasional / Realisasi Renstra Daerah Tahun 2017	Persentase
Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati	300 Spesies	0,67%
Jumlah Koleksi Endemik Luwu utara yang terdata	2 Spesies	

Hasil persandingan menunjukkan bahwa Koleksi spesies endemik Luwu Utara pada Tahun 2019 sebanyak 2 spesies memberikan kontribusi 0,67% dari target nasional.

3.1.3.7 Penegakan Hukum Lingkungan

Tabel 3.20
Kontribusi Penegakan Hukum Lingkungan terhadap target nasional

Indikator Nasional / Indikator Renstra Dinas LH	Target Nasional / Realisasi Renstra Daerah Tahun 2018	Persentase Kontribusi
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	60,00%

Indikator Nasional / Indikator Renstra Dinas LH	Target Nasional / Realisasi Renstra Daerah Tahun 2018	Persentase Kontribusi
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	60 %	
Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH sebesar 100% per tahun dari izin yang diterbitkan oleh KLH	100 %	56,00%
Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH sebesar 100% per tahun dari izin yang diterbitkan oleh Pemkab. Luwu Utara	56 %	

Hasil persandingan menunjukkan bahwa Persentase Pengaduan masyarakat Luwu Utara yang ditindaklanjuti mencapai 60%, hal ini sejalan dengan arahan capaian Nasional. Sedangkan pada Sasaran pengawasan pada usaha yang berizin lingkungan ini belum memenuhi target capaian nasional.

3.2. Akuntabilitas Keuangan Dinas LH Tahun 2019

Akuntabilitas Keuangan Dinas LH Tahun 2019 Merujuk Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang APBD kabupaten Luwu Utara TA. 2019 yang didetailkan dalam Peraturan Bupati nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD kabupaten Luwu Utara TA. 2019 serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang APBD kabupaten Luwu Utara TA. 2019 yang didetailkan dalam Peraturan Bupati nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD kabupaten Luwu Utara TA. 2019.

3.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara adalah sektor persampahan yakni Retribusi Persampahan. ditargetkan pada akhir Desember 2019 Penerimaan PAD Kab. Luwu Utara melalui Retribusi persampahan mencapai **Rp. 201.720.000** (Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan Realisasi penerimaan PAD dari retribusi

persampahan mencapai **Rp. 197.705.000 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh ratus Lima Ribu Rupiah)** atau dengan tingkat capaian 98,01 %.

Tabel 3.21
Realisasi PAD Per 31 Desember Tahun 2019

Uraian	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
1	2	3	4 = 3 / 2
Retribusi Persampahan	Rp 201.720.000	Rp 197.705.000	98,01%

1.2.2 Belanja Daerah

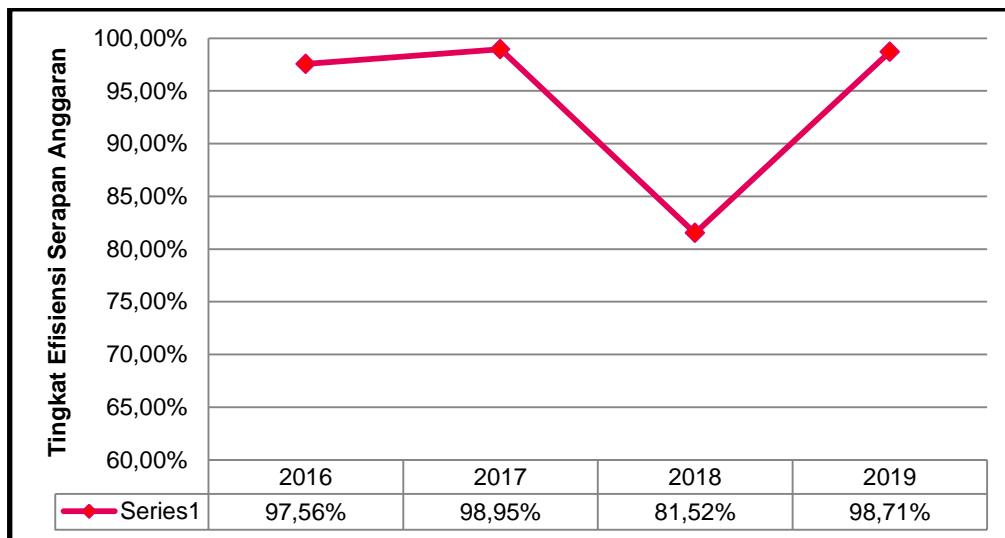
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2019 realisasi serapan anggaran Belanja Langsung dinas LH menyentuh angka **Rp. 5.201.189.007,00 (Lima Milyar Dua Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Rupiah)** dengan Tingkat Efisiensi Serapan Anggaran mencapai 98,71%. Tabel 3.25 menyajikan realisasi serapan anggaran belanja per komponen tersebut.

Tabel 3.22
Realisasi Serapan Belanja Langsung Dinas LH

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.526.544.000	Rp 4.493.538.899	99,27%
2	Belanja Modal	Rp 742.625.000	Rp 707.650.108	95,29%
	JUMLAH TOTAL	Rp 5.269.169.000	Rp 5.201.189.007	98,71%

Tabel Diatas menunjukkan Tingkat Efisiensi Serapan yang paling tinggi adalah Belanja Barang dan Jasa dengan nilai 99.27% sementara belanja Modal menjadi belanja dengan dengan Tingkat Efisiensi Serapan yang sangat rendah hanya 95.29%.

Tingkat Efisiensi Serapan Anggaran pada Tahun 2019 kembali naik **17,19 Point** dari tingkat efisiensi Serapan Anggaran Dinas LH Tahun 2018 yang menyentuh level 81,52%.



Gambar 6. Perbandingan Tingkat Efisiensi Serapan Anggaran Dinas LH

Selanjutnya untuk mengetahui Penyebab Tingkat efisiensi Serapan anggaran yang rendah Tabel 3.23. menyajikan data tersebut.

Tabel 3.23
Realisasi Serapan Anggaran Berdasarkan Program / kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN		Pendanaan Tahun 2019		
		Pagu Anggaran 2019	Realisasi Anggaran 2019	Persentase
1		3	4	5 = 4 / 3
BELANJA LANGSUNG		Rp 5.269.169.000	Rp 5.201.189.007	98,71%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 633.388.728	Rp 632.834.428	99,91%
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 400.000	Rp 400.000	100,00%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 18.765.228	Rp 18.733.419	99,83%
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 27.400.000	Rp 26.932.616	98,29%
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	100,00%
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 7.120.000	Rp 7.120.000	100,00%
	6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp 320.000.000	Rp 319.962.393	99,99%
	7. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian & Asset	Rp 241.703.500	Rp 241.686.000	99,99%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 210.123.972	Rp 210.098.237	99,99%
	1. Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Rp 4.500.000	Rp 4.475.108	99,45%
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100,00%

PROGRAM/KEGIATAN		Pendanaan Tahun 2019		
		Pagu Anggaran 2019	Realisasi Anggaran 2019	Persentase
1		3	4	5 = 4 / 3
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 161.000.000	Rp 160.999.399	100,00%
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 24.623.972	Rp 24.623.730	100,00%
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 9.900.000	Rp 9.900.000	100,00%
	1. Pengadaan mesin/kartu absensi	Rp 9.900.000	Rp 9.900.000	100,00%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 70.999.500	Rp 70.999.500	100,00%
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 70.999.500	Rp 70.999.500	100,00%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 63.470.000	Rp 63.192.000	99,56%
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 63.470.000	Rp 63.192.000	99,56%
6.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 2.754.847.800	Rp 2.724.175.654	98,89%
	2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Rp 2.754.847.800	Rp 2.724.175.654	98,89%
7.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 855.346.500	Rp 819.168.688	95,77%
	1. Pemantauan Kualitas Lingkungan	Rp 41.697.000	Rp 40.483.188	97,09%
	2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Rp 46.326.000	Rp 46.317.000	99,98%
	3. Pengkajian dampak lingkungan	Rp 32.729.500	Rp 32.724.500	99,98%
	4. Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Rp 728.225.000	Rp 693.275.000	95,20%
	5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Rp 6.369.000	Rp 6.369.000	100%
8.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp 62.556.000	Rp 62.544.000	99,98%
	1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Rp 62.556.000	Rp 62.544.000	99,98%
9.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 608.536.500	Rp 608.276.500	99,96%
	1. Pemeliharaan RTH	Rp 608.536.500	Rp 608.276.500	99,96%



4.1. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategisnya.

Tidak dapat dipungkiri berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masih ditemukan ketidaksesuaian, ketidaksinkronan antara capaian yang dihasilkan dengan capaian yang diharapkan yang disebabkan oleh kendala-kendala baik teknis maupun non teknis. terdapat beberapa kendala dan sekaligus menjadi Tantangan untuk dicarikan solusinya, secara garis besar diantaranya :

1. Masih bergabungnya Sekretariat Dinas LH dengan Laboratorium Dinas LH,
2. Tidak jelasnya Status Kepemilikan Lahan TPA Meli
3. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan, menyebabkan *High Cost Operasional*.
4. Rendahnya Kapasitas pegawai baik kapasitas manajemen maupun kapasitas teknis dalam Pengelolaan dan Perlindungan LH.
5. Tingginya budaya ego sektoral di kalangan pegawai.

4.2. SARAN TINDAK LANJUT

Hasil evaluasi menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara, untuk itu kedepannya diupayakan solusinya antara lain:

1. Diusulkan kepada Pimpinan agar Sekretariat Dinas LH berpisah dengan gedung laboratorium demi optimalnya penyelenggaraan program dan kegiatan.
2. Diusulkan kepada pimpinan agar status Lahan TPA Meli diperjelas demi pengembangan Sarana dan Prasarana TPA

3. Diperlukan Peningkatan Kapasitas SDM baik dari segi teknis maupun Administrasi sehingga dapat melahirkan personil Dinas LH yang Inovatif dan beretos kerja tinggi cara mengikutkan pegawai pada pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan bidangnya.
4. Diperlukan sistem manajemen Leadership yang baik demi mendukung sinergitas pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan Hidup.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Masamba, Januari 2020
Kepala Dinas LH



Ir. **BAMBANG IRAWAN, M.Si**
Rt. Pembina Utama Muda
Nip. 196112611993031043